

Kemiskinan Perkotaan dan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi di Indonesia

Yuli Utami ^{1*}, Djunarto ², Willyan Sahetapy ³

^{1*} Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

² Pascasarjana, Universitas Jayabaya, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

³ Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, STIE Bukit Zaitun Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Indonesia

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara kemiskinan perkotaan dan partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia menggunakan data time series selama periode 1998-2021. Model analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana yang kemudian diestimasi dengan pendekatan ordinary least square (OLS). Melalui analisis data empiris, penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan perkotaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap partisipasi pendidikan tinggi, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi di lingkungan perkotaan dapat menjadi hambatan dalam akses dan partisipasi pendidikan tinggi bagi masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi.

Kata kunci: Partisipasi Pendidikan Tinggi; Kemiskinan Perkotaan; Regresi Linier.

Abstract. This research aims to investigate the relationship between urban poverty and higher education participation in Indonesia using time series data during the 1998-2021 period. The analytical model used is simple linear regression which is then estimated using the ordinary least squares (OLS) approach. Through empirical data analysis, this research finds that urban poverty has a significant negative influence on higher education participation, indicating that high levels of poverty in urban environments can be a barrier to higher education access and participation for economically marginalized communities.

Keywords: Higher Education Participation; Urban Poverty; Linier Regression.

* Corresponding Author. Email: yuliotami@umy.ac.id ^{1*}.

Pendahuluan

Kemiskinan perkotaan menjadi fenomena kompleks yang melibatkan beragam faktor, termasuk kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur perkotaan yang kurang memadai (Sumarto & Suryahadi, 2003). Dampak dari kemiskinan perkotaan tidak hanya membatasi akses terhadap pendidikan tinggi bagi individu-individu yang terkena dampak, tetapi juga berpotensi memperpetuasi siklus kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Beegle *et al.*, 2006).

Dalam dua dasawarsa terakhir, tingkat kemiskinan perkotaan di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Namun secara keseluruhan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 1998, tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 21,92 persen. Angka ini menurun pada periode berikutnya hingga menjadi sebesar 9,79 persen pada tahun 2001. Selanjutnya, pada tahun 2002 kembali meningkat menjadi 14,46 persen. Hingga tahun 2021, tingkat kemiskinan perkotaan di Indonesia sebesar 7,79 persen. Artinya, sebesar 7,79 persen dari total penduduk yang tinggal di daerah perkotaan masuk dalam katagori kelompok miskin.

Seiring dengan perubahan tingkat kemiskinan perkotaan, angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia, juga berfluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah (APS) anak usia 19-24 tahun. Pada tahun 1998 APS kelompok ini sebesar 12,10 persen. Artinya, hanya sebesar 12,10 persen dari total anak dengan usia berkisar antara 19-24 tahun yang memperoleh pendidikan tinggi. Pada tahun berikutnya, angka ini meningkat menjadi sebesar 12,70 persen, dan kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2000 menjadi sebesar 12,31 persen. Hingga tahun 2021, APS kelompok ini sebesar 23,38 persen. Angka partisipasi pendidikan tinggi Indonesia seperti dijelaskan di atas, masih termasuk katagori rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara (World Bank, 2019). Meskipun upaya pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan telah dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi tersebut, masih terdapat tantangan

besar yang perlu diatasi, terutama di kalangan masyarakat perkotaan yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial (Irawan, 2018).

Kemiskinan perkotaan dan rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi merupakan dua isu penting yang menjadi fokus perhatian dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Meskipun negara ini telah mencatat kemajuan signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan, terutama di tingkat dasar dan menengah, tantangan berkelanjutan masih dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi, terutama di kalangan masyarakat perkotaan yang terpinggirkan secara ekonomi. Karena itu, kajian ini berupaya untuk mengungkapkan fakta empiris mengenai pengaruh kemiskinan perkotaan terhadap partisipasi pendidikan tinggi. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dinamika antara kemiskinan perkotaan dan partisipasi pendidikan tinggi, diharapkan upaya untuk mencapai inklusi pendidikan tinggi yang lebih luas dan berkelanjutan dapat ditingkatkan.

Tinjauan Literatur

Kemiskinan perkotaan seringkali berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi yang buruk, termasuk tingkat pengangguran yang tinggi, kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak, infrastruktur yang tidak memadai, dan ketimpangan ekonomi yang besar antara berbagai kelompok masyarakat (Silva-Laya *et al.*, 2019). Kemiskinan perkotaan memiliki atribut tertentu yang memperburuk pembatasan dalam bagaimana hak-hak sosial dilaksanakan (Winchester, 2008), dan tidak terkecuali hak untuk memperoleh pendidikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan terkonsentrasi di lingkungan perkotaan dan kondisi sosial buruk yang menyertai kemiskinan ini, mempengaruhi kinerja sekolah dan siswa (Noguera, 2011). Karena itu, memberikan perhatian lebih terhadap fenomena pendidikan di kalangan masyarakat miskin perkotaan merupakan prioritas penelitian, kebijakan dan program sosial.

Kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dapat sebagai *predictor* atau variabel penyebab

bagi fenomena sosial lainnya seperti partisipasi pendidikan anak. Apalagi, tingkat kemiskinan yang tinggi sering kaitkan dengan tingkat pendidikan yang rendah (Arunatilake, 2006; Hofmarcher, 2021). Hingga saat ini arah hubungan antara kedua variabel ini telah sering menjadi sorotan peneliti sosial ekonomi (Brown & Park, 2002). Sejumlah kajian empiris membuktikan bahwa pendidikan yang diperoleh oleh sesorang anak terkait dengan kemampuan orang tua mereka dalam membiayai biaya pendidikan. Kemampuan keuangan dan stabilitas ekonomi keluarga dapat mempengaruhi capaian pendidikan anak (Elliott, 2013).

Kemerosotan ekonomi mempunyai implikasi penting terhadap pencapaian pendidikan dan akumulasi sumber daya manusia anak (McGovern, & Rokicki, 2023). Keluarga dengan kemampuan ekonomi yang rendah, akan kesulitan untuk membiayai biaya pendidikan anak mereka. Sehingga kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya tingkat pencapaian pendidikan (Filmer, 2000). Semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin rendah capaian pendidikan. Kesempatan seseorang anak untuk memperoleh pendidikan sering kali hilang disebabkan anak tersebut berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu membiayai biaya pendidikan (Mihai *et al.*, 2015). Sebelumnya, kajian yang dilakukan Shapiro & Oleko Tambahe (2001) juga mengungkapkan bahwa peningkatan kemampuan keuangan rumah tangga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan capaian pendidikan anak.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data *time series* tahunan selama periode 1998-2021 ($n=24$). Data bersumber dari laporan statistik Indonesia yang dipublikasikan oleh BPS Indonesia. Variabel yang diprediksi adalah tingkat partisipasi pendidikan tinggi. Variabel ini diproksi dari angka partisipasi sekolah anak usia 19-24 tahun, yang kemudian dinyatakan dalam satuan persen. Selanjutnya *predictor variable* adalah tingkat kemiskinan perkotaan, yakni rasio penduduk miskin terhadap total

penduduk yang tinggal di daerah perkotaan yang kemudian dinyatakan dalam satuan persen. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh kemiskinan perkotaan terhadap partisipasi pendidikan tinggi digunakan regresi linier sederhana, yang kemudian diestimasi dengan pendekatan kuadrat terkecil (*ordinary least square*, OLS). Secara statistik persamaan regresi tersebut seperti dalam Model 1.

$$PPT_t = \alpha + \beta MSK_t + \mu_1 \quad (1)$$

Dimana, PPT_t adalah angka partisipasi pendidikan tinggi yang diproksi dari angka partisipasi sekolah anak usia 19-24 tahun pada tahun t , MSK_t adalah ingkat kemiskinan perkotaan pada tahun t . Selanjutnya, α adalah konstanta dan β adalah koefisien estimasi MSK_t terhadap PPT_t . Terakhir, μ adalah error term. Untuk mempercepat proses perhitungan dan menghindari terjadinya kesalahan, seluruh proses pengolahan data menggunakan software *E-Views 10*. Untuk menguji signifikansi pengaruh MSK_t terhadap PPT_t didasarkan pada nilai *p-value* yang dihasilkan melalui output *E-Views*, dengan ketentuan jika *p-value* < 0,05 dapat diartikan bahwa pada tingkat keyakinan 95%, kemiskinan perkotaan berpengaruh terhadap partisipasi pendidikan tinggi. Interpretasi sebaliknya berlaku jika *p-value* > 0,05 (Amri *et al.*, 2023; Fahira *et al.*, 2023; Arifin & Amri, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Hasil statistik deskriptif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kajian ini mengoperasionalkan dua variabel terdiri dari kemiskinan perkotaan dan partisipasi pendidikan tinggi. Kemiskinan perkotaan adalah kondisi ketika individu, keluarga, atau kelompok dalam suatu wilayah perkotaan memiliki pendapatan atau akses yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, perumahan layak, pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi. Dalam kajian ini, kemiskinan perkotaan di ukur dari rasio jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan terhadap total penduduk yang tinggal di daerah perkotaan pada periode yang sama, yang kemudian dinyatakan dalam satuan persen.

Selanjutnya, partisipasi pendidikan tinggi dapat diartikan sebagai partisipasi anak usia 19-24 tahun untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Angka partisipasi ini adalah perbandingan antara anak dalam kelompok usia tersebut yang memperoleh pendidikan tinggi dengan total anak secara keseluruhan dalam periode yang sama dan kemudian dinyatakan

dalam satuan persen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan tinggi di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Demikian pula halnya partisipasi pendidikan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil statistik deskriptif masing-masing variabel seperti terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil statistik deskriptif

Parameter Statistik	Kemiskinan perkotaan (%)	Partisipasi pendidikan tinggi (%)
Mean	10,941	16,529
Median	9,830	13,185
Maximum	21,920	24,672
Minimum	6,560	11,380
Std, Dev,	3,883	5,300
Jarque-Bera	8,221	3,533
(<i>p-value</i>)	(0,016)	(0,171)
Obs	24	24

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan E-Views 10.

Tabel 1 di atas memperlihatkan hasil statistik deskriptif kedua variabel penelitian. Untuk kemiskinan perkotaan misalnya, nilai maksimum sebesar 21,92 persen. Angka ini adalah tingkat kemiskinan perkotaan pada periode tahun 1998. Sebaliknya, nilai minimum kemiskinan sebesar 6,56 persen terjadi pada tahun 2019. Selama periode 1998-2021, rata-rata tingkat kemiskinan perkotaan di Indonesia sebesar 10,941.

Selanjutnya, berkaitan dengan partisipasi pendidikan tinggi. Seperti dalam Tabel di atas, nilai maksimum dan minimum variabel ini masing-masing sebesar 24,67 persen dan 11,38 persen. Angka ini masing-masing adalah APS anak usia 19-24 tahun pada tahun 2017 dan tahun 2006. Ini dapat diartikan bahwa angka partisipasi pendidikan tinggi paling tinggi terjadi pada tahun 2017 dan sebaliknya, angka partisipasi pendidikan tinggi terendah wujud pada tahun 2006. Secara rata-rata partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia sebesar 16,52 persen.

Analisis estimasi

Kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anak ke jenjang pendidikan tinggi tentunya terkait dengan kondisi keuangan keluarga. Keluarga yang masuk dalam katagori miskin akan mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan pendidikan anak mereka hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Karena itu, secara makro, penempatan tingkat kemiskinan sebagai *predictor* bagi angka partisipasi pendidikan tinggi memiliki landasan rasional yang kuat. Hasil regresi linier sederhana dengan pendekatan *ordinary least square* (OLS), memberikan bukti statistik bahwa tingkat kemiskinan perkotaan berpengaruh negatif terhadap partisipasi pendidikan tinggi dengan koefisien estimasi sebesar -0,978. Pengaruh negatif ini sangat signifikan dengan *p-value* sebesar 0,000 (<0,01), dapat diinterpretasikan bahwa signifikansi pengaruh negatif tingkat kemiskinan terhadap partisipasi pendidikan tinggi wujud pada tingkat keyakinan 99 persen. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil OLS pengaruh tingkat kemiskinan terhadap partisipasi pendidikan tinggi dapat dilihat Tabel 2.

Tabel 2. Hasil *ordinary least square*

Konstanta & independent variable	Dependent Variabel: Partisipasi pendidikan tinggi	
	Koefisien estimasi	<i>p-value</i>
C (β_0)	27,227 [11,579]	0.000
MSK(β)	-0,978 [-4,816]	0.000
R ²	0,513	
Adjusted R ²	0,491	
F-test	23,201 (0,000)	
D-W	0,335	
Normalitas Residual		
J-B	2,414	
Prob	0,299	
Heteroskedasticity Test: White		
F-statistic	5,925 (0,009)	
Obs*R-squared	8,658 (0,013)	
Scaled explained SS	1,714 (0,425)	
Serial Correlation LM Test: Breusch-Godfrey		
F-statistic	15,740 (0,000)	
Obs*R-squared	14,676 (0,001)	

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan E-Views 10.
Catatan: Nilai *p-value* < 0,05 mengindikasikan signifikan pada keyakinan 95 persen.

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dipahami bahwa kajian ini mengungkapkan adanya hubungan fungsional antara partisipasi pendidikan tinggi dengan tingkat kemiskinan perkotaan. Kemiskinan perkotaan berpengaruh negatif terhadap partisipasi pendidikan tinggi yang secara statistik dapat dimaknai bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin rendah partisipasi pendidikan tinggi. Sebaliknya, partisipasi pendidikan ini meningkat ketika tingkat kemiskinan perkotaan menurun. Temuan ini memberikan pemahaman yang dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan yang terpinggirkan secara ekonomi dalam mencapai akses pendidikan tinggi. Faktor-faktor seperti keterbatasan finansial, kurangnya akses informasi, dan infrastruktur pendidikan yang kurang memadai di lingkungan perkotaan dengan tingkat

kemiskinan relatif tinggi dapat menjadi penyebab utama dari fenomena ini. Keterbatasan finansial seringkali menjadi hambatan utama bagi individu-individu dari latar belakang ekonomi rendah untuk mengakses pendidikan tinggi. Biaya pendidikan yang tinggi di perguruan tinggi, termasuk biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya buku, dapat menjadi beban yang berat bagi keluarga yang berpenghasilan rendah. Sebagai akibatnya, banyak individu dari keluarga miskin di perkotaan tidak mampu untuk mengejar pendidikan tinggi meskipun memiliki potensi dan motivasi yang tinggi.

Selain keterbatasan finansial, kurangnya akses informasi tentang jalur pendidikan tinggi juga merupakan masalah yang signifikan. Banyak individu dari latar belakang ekonomi rendah

tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang program-program beasiswa, bantuan keuangan, atau jalur akses alternatif untuk pendidikan tinggi. Kurangnya pemahaman tentang proses pendaftaran, persyaratan masuk, dan pilihan program studi juga dapat menghambat partisipasi pendidikan tinggi. Selanjutnya, infrastruktur pendidikan yang kurang memadai di daerah perkotaan yang miskin juga menjadi kendala serius. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai di daerah perkotaan dapat menjadi kendala serius bagi akses pendidikan tinggi. Selain itu, infrastruktur pendidikan yang kurang mencukupi juga dapat membatasi kemampuan lembaga pendidikan untuk menyediakan lingkungan belajar yang memadai dan mendukung (Pramono, 2020). Sekolah dan perguruan tinggi yang terletak di lingkungan yang kurang berkembang seringkali tidak dilengkapi dengan fasilitas dan sumber daya yang cukup, seperti perpustakaan yang lengkap, laboratorium yang memadai, atau akses internet yang stabil. Hal ini dapat membatasi kemampuan lembaga pendidikan untuk menyediakan lingkungan belajar yang memadai dan mendukung bagi siswa dari latar belakang ekonomi rendah.

Adanya pengaruh negatif dan signifikan dari tingkat kemiskinan perkotaan ke partisipasi pendidikan tinggi konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya. Sejumlah studi telah mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi yang buruk di lingkungan perkotaan dapat menjadi penghalang signifikan bagi akses pendidikan tinggi. Misalnya, penelitian oleh Abdullah & Ridwan (2017) menemukan bahwa kemiskinan perkotaan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap partisipasi pendidikan tinggi. Temuan penelitian ini juga memperkuat pemahaman tentang kompleksitas faktor-faktor yang terlibat dalam hubungan antara kemiskinan perkotaan dan partisipasi pendidikan tinggi. Misalnya, penelitian oleh Setiawan (2019) menyoroti peran penting akses terhadap informasi dalam menentukan partisipasi pendidikan tinggi di kalangan masyarakat perkotaan yang miskin. Kesulitan finansial yang dihadapi oleh sebagian masyarakat miskin yang tinggal di daerah perkotaan dapat mengalami kesulitan untuk mengakses informasi tentang jalur pendidikan

tinggi, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan partisipasi pendidikan tinggi secara umum.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara lainnya di Asia. Secara teoritis, partisipasi pendidikan terkait dengan kemampuan keuangan masyarakat dalam membiayai pendidikan anaknya. Ketika tingkat kemiskinan tinggi dan kemampuan keuangan masyarakat menurun, maka kondisi ini dapat menjadi kendala utama bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan anak hingga ke perguruan tinggi. Menggunakan data *time series* selama periode 1998-2021, penelitian ini menguji pengaruh tingkat kemiskinan perkotaan terhadap partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Penelitian menemukan adanya hubungan negatif antara kemiskinan perkotaan dan partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi di lingkungan perkotaan cenderung menghambat akses dan partisipasi pendidikan tinggi bagi masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi. Fenomena ini dapat disebabkan oleh beragam faktor, termasuk keterbatasan sumber daya finansial, kurangnya akses terhadap informasi tentang jalur pendidikan tinggi, serta kurangnya dukungan infrastruktur pendidikan di daerah perkotaan yang miskin.

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia, pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan akses dan ketersediaan beasiswa, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok miskin. Dengan kata lain, pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas beasiswa bagi masyarakat perkotaan yang berada dalam kondisi ekonomi rendah. Beasiswa ini dapat mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, dan bantuan lainnya untuk memastikan bahwa individu-individu yang kurang mampu tetap dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa terhalang oleh masalah keuangan. Hal penting lainnya adalah diperlukan adanya pengembangan program pendidikan berbasis

komunitas. Program-program pendidikan tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masyarakat perkotaan miskin perlu dikembangkan. Ini dapat mencakup program-program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, serta program-program akses pendidikan tinggi yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas.

Selain itu, pemerintah perlu untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap efektivitas kebijakan dan program-program yang diimplementasikan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di lingkungan perkotaan yang miskin. Data-data ini dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan program secara berkala guna memastikan bahwa upaya-upaya tersebut mencapai hasil yang diinginkan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, R., & Ridwan, A. (2017). the impact of urban poverty on higher education participation in Indonesia. *Journal of Urban Studies*, 12(3), 45–58.
- Amri, K., Adnan, M., & Julianty, J. (2023). Pendapatan perempuan dan Pendidikan anak usia dini. *Pencerahan*, 17(2), 49-76.
- Arifin, M., & Amri, K. (2024). Inflasi dan Realisasi Pembiayaan Kepemilikan Rumah pada Bank Umum Syariah di Indonesia: Peran Pandemi Covid-19 Sebagai Pemoderasi. *Jurnal EMT KITA*, 8(2), 579–591. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i2.2264>
- Arunatilake, N. (2006). Education participation in Sri Lanka—Why all are not in school. *International Journal of Educational Research*, 45(3), 137–152. DOI:10.1016/j.ijer.2006.11.001
- Beegle, K., Dehejia, R., & Gatti, R. (2006). Child labor and agricultural shocks. *Journal of Development Economics*, 81(1), 80–96.
- Brown, P. H., & Park, A. (2002). Education and poverty in rural China. *Economics of Education Review*, 21(6), 523-541. [https://doi.org/10.1016/S0272-7757\(01\)00040-1](https://doi.org/10.1016/S0272-7757(01)00040-1)
- Elliott, W. (2013). The effects of economic instability on children's educational outcomes. *Children and Youth Services Review*, 35(3), 461–471. DOI:10.1016/j.childyouth.2012
- Fahira, C. E., Chalisa, D., Karila, N., Rezaldi, M., Ramadhani, R. W., & Amri, K. (2023). Pengaruh belanja modal terhadap pengangguran di Indonesia. *Journal of Law and Economics*, 2(1), 10-21.
- Filmer, D. (2000). *The structure of social disparities in education*. World Bank policy research Working Paper No. 2268
- Hofmarcher, T. (2021). The effect of education on poverty: A European perspective. *Economics of Education Review*, 83, 102124. DOI:10.1016/j.econedurev.2021.102124
- Irawan, P. (2018). Challenges and opportunities for improving access to higher education in Indonesia. *Bulletin of Higher Education Research*, 1(1), 1–13.
- McGovern, M. E., & Rokicki, S. (2023). The great recession, household income, and children's test scores. *Review of Income and Wealth*, 69(3), 555-580. <https://doi.org/10.1111/roiw.12600>.
- Mihai, M., Țițan, E., & Manea, D. (2015). Education and poverty. *Procedia Economics and Finance*, 32, 855–860. DOI:10.1016/s2212-5671(15)01532-4
- Noguera, P. A. (2011). *A Broader and Bolder Approach Uses Education to Break the Cycle of Poverty*. *Phi Delta Kappan*, 93(3), 8–14. DOI:10.1177/003172171109300303

- Pramono, S. (2020). The role of educational infrastructure in higher education participation among urban poor: Evidence from Indonesia. *International Journal of Educational Development*, 18(4), 321–335.
- Setiawan, B. (2019). Access to information and higher education participation: A case study of urban poor communities in Indonesia. *Bulletin of Higher Education Research*, 4(2), 87–102.
- Shapiro, D., & Oleko Tambashe, B. (2001). Gender, poverty, family structure, and investments in children's education in Kinshasa, Congo. *Economics of Education Review*, 20(4), 359–375. DOI:10.1016/s0272-7757(00)0005
- Silva-Laya, M., D'Angelo, N., García, E., Zúñiga, L., & Fernández, T. (2019). Urban poverty and education. A systematic literature review. *Educational Research Review*. DOI:10.1016/j.edurev.2019.05.002
- Sumarto, S., & Suryahadi, A. (2003). The urbanization of poverty in Indonesia: Causes, consequences, and lessons for the future. SMERU Working Paper.
- Winchester, L. (2008). La dimensión económica de la pobreza y precariedad urbana en las ciudades latinoamericanas: Implicaciones para las políticas del habitat. *Eure*, 34(103), 27–47. <https://doi.org/10.4067/S0250-71612008000300002>
- World Bank. (2019). *Indonesia: Enhancing Tertiary Education for Growth*. World Bank Group.